



KOLABORASI ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nunung Royani^{1,2}, Putri Agusna¹

¹Institut Pemerintaan Dalam Negeri

²corresponding author: nunungroyani@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan banjir bandang berulang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis dan belum optimalnya implementasi mandat regulatif mengenai keterlibatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengkaji bagaimana proses kolaboratif terbentuk dan dijalankan berdasarkan lima dimensi collaborative governance Ansell dan Gash (2008), dengan teori siklus manajemen bencana serta tangga partisipasi Arnstein digunakan sebagai kerangka pembanding untuk memperkuat argumentasi pemilihan pisau analisis. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan 13 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas pejabat BPBD dan warga dari tiga kecamatan rawan banjir. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pada kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta dokumentasi laporan kelembagaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi berkembang secara bertahap tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, dengan dimensi komitmen terhadap proses menjadi aspek paling rentan yang mempengaruhi konsistensi kepercayaan, keselarasan pemahaman, serta capaian sementara dalam tata kelola banjir di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanggulangan Bencana, BPBD, Partisipasi Masyarakat, Banjir Bandang, Kabupaten Lahat.

Copyright (c) 2025 Nunung Royani, Putri Agusna



This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International
License.

ABSTRACT

This study examines the collaborative dynamics between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and local communities in addressing recurrent flash floods in Lahat Regency, South Sumatra. The increasing frequency of hydrometeorological disasters and the gap between regulatory mandates for community involvement and their actual implementation form the background of this research. The study aims to analyze how collaborative processes emerge and function across five dimensions proposed by Ansell and Gash (2008), while also positioning the disaster management cycle and Arnstein's ladder of participation as comparative frameworks to justify the analytical focus on inter-actor interaction, trust building, shared commitment, and collective outcomes. Employing a descriptive qualitative design, the research involves 13 purposively selected informants comprising BPBD officials and residents from three flood-prone subdistricts. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation during preparedness and response activities, and documentation of institutional reports. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with credibility strengthened through source and method triangulation. The findings reveal that collaborative practices have grown progressively yet remain weakly institutionalized, with the dimension of commitment to process identified as the most fragile, influencing the consistency of trust, shared understanding, and interim results in local flood governance.

Keywords: *Collaborative Governance, Disaster Management, BPBD, Community Participation, Flash Floods, Lahat Regency.*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global yang semakin ekstrem telah memunculkan berbagai tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik dan dua samudra besar, Indonesia berada pada zona rawan bencana yang kompleks. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tahun 2023 tercatat 5.400 kejadian bencana di Indonesia, di mana banjir merupakan jenis bencana dengan jumlah tertinggi,

mencapai 1.255 kejadian. Salah satu daerah yang terdampak signifikan oleh fenomena ini adalah Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki karakteristik topografi perbukitan dan curah hujan tinggi.

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Lahat secara berulang antara tahun 2020 hingga 2023 mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta kerugian ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat setempat. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa banjir bandang dengan ketinggian air antara 1,2 hingga 2 meter terjadi hampir setiap tahun di beberapa

kecamatan, seperti Lahat, Kikim Timur, dan Gumay Ulu. Kondisi ini mempertegas pentingnya sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga partisipatif dan berbasis komunitas. Data lapangan yang dihimpun peneliti juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami jalur evakuasi dan langkah kesiapsiagaan dasar sehingga memperbesar risiko ketika banjir bandang terjadi (Anggun et al., 2020; Kurniadi, 2024).

Dalam konteks penanggulangan bencana modern, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat semakin diakui sebagai model yang efektif. Kolaborasi ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan keterlibatan aktif semua aktor, termasuk komunitas lokal, dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi (Anwar, 2024). Pendekatan ini didukung oleh teori collaborative governance yang dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pencapaian hasil bersama dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif dan responsif.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa

upaya kolaboratif antara BPBD dan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya kesadaran lingkungan, serta terbatasnya infrastruktur penunjang, seringkali menjadi penghambat efektivitas kolaborasi (Hasanuddin et al., 2025). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran aktif dalam sistem penanggulangan bencana turut memperbesar risiko sosial ketika bencana terjadi (Anggun et al., 2020). Kondisi ini menggambarkan adanya gap normatif, di mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2016 yang mewajibkan keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik di Kabupaten Lahat.

Dari sisi keilmuan, terdapat gap teoritik karena teori collaborative governance banyak diterapkan pada konteks pelayanan publik dan program sosial, namun penerapannya dalam konteks kebencanaan hidrometeorologis pada wilayah perdesaan berisiko tinggi seperti Kabupaten Lahat masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut belum sepenuhnya menjelaskan dinamika sosial dan institusional pada kolaborasi berbasis komunitas dalam situasi darurat bencana.

Selain itu, terdapat gap riset, yaitu minimnya penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji proses kolaborasi antara BPBD dan masyarakat pada penanganan banjir bandang, terutama yang didukung oleh data empiris terkait interaksi, pola komunikasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan kendala aktual di lapangan. Temuan awal peneliti menunjukkan bahwa koordinasi antarbidang BPBD dan masyarakat sering bersifat situasional serta belum terlembaga dengan baik (Amriampa et al., 2024; Anggara et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara kualitatif bentuk kolaborasi antara BPBD Kabupaten Lahat dan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir bandang, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan upaya perbaikan kolaborasi tersebut. Fokus utama kajian ini adalah pada interaksi sosial, pola komunikasi, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengungkap dinamika sosial dan institusional yang berlangsung dalam praktik kolaborasi kebencanaan di daerah yang rawan bencana.

Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya

khazanah ilmu administrasi publik dan manajemen kebencanaan, khususnya terkait penerapan collaborative governance dalam konteks lokal Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengisi kekosongan teoretis mengenai bagaimana aktor pemerintah dan masyarakat membangun proses kolaboratif dalam situasi bencana berulang di daerah rawan banjir bandang. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.

KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini berfungsi untuk membangun dasar konseptual yang dapat menjelaskan dinamika kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat. Dalam perspektif administrasi publik, penanggulangan bencana merupakan isu kebijakan yang memerlukan koordinasi lintas aktor karena kompleksitasnya tidak dapat ditangani oleh pemerintah semata. Dengan demikian, kerangka teoritis yang digunakan harus mampu memetakan relasi, proses interaksi, serta mekanisme

kolaborasi antara pemerintah daerah dan Masyarakat (Ostrom, 1990; Setiawan et al., 2021).

Salah satu teori yang sering digunakan dalam kajian kebencanaan adalah teori manajemen siklus bencana (disaster management cycle) yang membagi penanggulangan bencana ke dalam tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (Haddow et al., 2017). Model ini memberikan gambaran operasional mengenai bagaimana bencana ditangani secara prosedural. Meskipun demikian, pendekatan ini lebih menekankan pada tahapan teknis dan tidak secara memadai menjelaskan dinamika hubungan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam proses koordinasi dan kolaborasi, terutama pada tingkat pemerintahan lokal.

Teori partisipasi masyarakat yang diperkenalkan Arnstein (1969) melalui konsep “tangga partisipasi” (ladder of participation) juga banyak digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik. Teori ini memberikan panduan normatif mengenai bagaimana posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan mulai dari tingkat non-participation hingga citizen control. Namun, teori ini tidak menjelaskan mekanisme interaksi antara pemerintah

dan masyarakat, seperti bagaimana kepercayaan dibangun, bagaimana dialog berlangsung, serta bagaimana komitmen bersama dapat muncul sebagai bagian dari proses pengelolaan bencana.

Keterbatasan dua pendekatan tersebut menegaskan perlunya kerangka analisis yang lebih integratif, khususnya dalam memahami bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menghadapi bencana. Dalam konteks ini, teori collaborative governance yang dikembangkan (Ansell & Gash, 2008) menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya menguraikan struktur hubungan antar-aktor, tetapi juga menjelaskan proses kolaboratif melalui indikator seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta pencapaian hasil sementara. Model ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam mengenai kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara BPBD dan masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana banjir bandang.

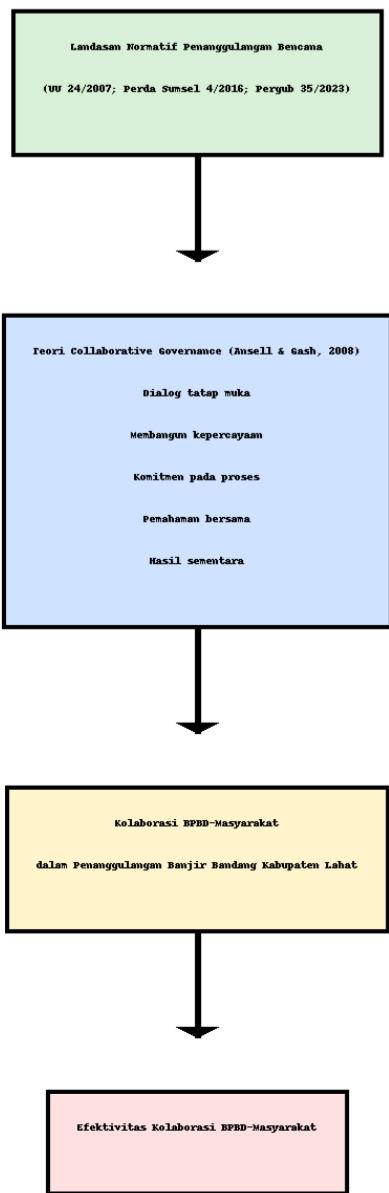
Relevansi teori collaborative governance semakin terlihat ketika dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Lahat yang menghadapi banjir bandang berulang, ditambah hambatan seperti keterbatasan anggaran, minimnya

kapasitas masyarakat, dan lemahnya saluran komunikasi. Teori ini memberikan perangkat analitis yang sesuai untuk menilai bagaimana BPBD sebagai aktor utama dapat membangun kolaborasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang terus meningkat.

Selain kerangka teoritis, penelitian ini juga didukung oleh landasan normatif penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (Kamadhis UGM, 2007). Integrasi antara kerangka normatif ini dengan teori collaborative governance menghasilkan fondasi konseptual yang solid untuk

menilai proses, hambatan, dan efektivitas kolaborasi BPBD dan masyarakat dalam menangani banjir bandang di Kabupaten Lahat.

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun dengan mengintegrasikan landasan normatif penanggulangan bencana, teori peran pemerintah daerah dalam administrasi publik, serta teori collaborative governance sebagai kerangka analisis utama. Regulasi penanggulangan bencana memberikan dasar hukum bagi BPBD untuk mengoordinasikan berbagai aktor dalam menghadapi bencana. teori collaborative governance memberikan indikator analitis untuk menilai efektivitas kolaborasi antara BPBD dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut dikaitkan dengan kondisi empiris Kabupaten Lahat, sehingga membentuk kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan kausal antara landasan normatif, proses kolaboratif, dan efektivitas penanggulangan bencana.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pola interaksi dan kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam

konteks penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik permasalahan yang kompleks dan kontekstual, sehingga membutuhkan pemahaman atas makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Pemilihan desain ini juga mempertimbangkan kebutuhan untuk membaca proses tata kelola kolaboratif secara utuh, termasuk konteks institusional dan relasi antaraktor yang terlibat (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya menangkap fenomena empiris, tetapi juga memetakan konstruksi sosial yang melatarbelakangi praktik kolaborasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lahat, yang merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir bandang. Fokus wilayah penelitian berada pada tiga kecamatan yang paling sering terdampak, yakni Kecamatan Lahat, Lahat Selatan, dan Kikim Timur. Penelitian berlangsung pada Maret hingga Mei 2024, bertepatan dengan periode rawan bencana sehingga memungkinkan peneliti mengamati aktivitas penanggulangan secara langsung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif berdasarkan intensitas kejadian

bencana dan kebutuhan untuk memahami secara komprehensif dinamika kelembagaan lokal dalam menjalankan mandat penanggulangan bencana berbasis kolaborasi. Konteks empiris ini sejalan dengan tujuan penelitian yang berupaya melihat praktik kolaboratif sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan keterlibatan, peran, dan pengetahuan mereka terhadap penanggulangan bencana. Total 13 informan dilibatkan, terdiri dari empat pejabat struktural BPBD Kabupaten Lahat, yaitu Kepala BPBD, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Selain itu, sembilan warga dari tiga kecamatan terdampak dipilih untuk menggambarkan variasi pandangan, pengalaman, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kolaborasi. Pemilihan informan ini didasarkan pada operasionalisasi konsep kolaborasi yang melibatkan aktor negara dan non-negara, sehingga data yang diperoleh mencerminkan berbagai pola komunikasi

dan koordinasi yang relevan dengan teori collaborative governance.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Creswell & Poth, 2018). Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali narasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan evaluasi aktor terhadap proses kolaboratif. Observasi partisipatif dilakukan pada kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk mengidentifikasi pola interaksi, praktik koordinasi, serta peran masing-masing aktor dalam situasi bencana. Sementara itu, studi dokumentasi menelaah dokumen resmi seperti struktur organisasi BPBD, laporan kegiatan tahunan, peta rawan bencana, serta catatan operasional lainnya yang mendukung temuan lapangan. Penggunaan tiga teknik ini memungkinkan triangulasi metode secara langsung dan memperkuat keutuhan data yang dikumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan berbagai informan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, sedangkan

triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi temuan wawancara melalui observasi dan dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk memastikan konsistensi temuan, mengurangi bias persepsi, dan meningkatkan kredibilitas interpretasi data, sesuai dengan standar penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data berdasarkan tema-tema yang relevan, terutama yang berkaitan dengan indikator kolaborasi seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash (2008). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif tematik untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola interaksi dan hubungan antaraktor. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif, dengan tetap membuka ruang verifikasi apabila ditemukan data baru selama proses analisis. Proses analisis yang sistematis ini memastikan bahwa

interpretasi data dilakukan secara bertahap dan komprehensif.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk mengkaji praktik kolaborasi dalam penanggulangan bencana tidak semata sebagai respons teknokratis, tetapi sebagai proses tata kelola yang melibatkan dialog, negosiasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih kolaboratif, responsif, dan adaptif dalam konteks pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap kolaborasi penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa hubungan kerja antara BPBD, masyarakat, dan sektor swasta terbentuk dalam konteks kebutuhan kolektif untuk merespons risiko bencana yang terjadi hampir setiap tahun. Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi pada lokasi terdampak, serta penelusuran dokumen kelembagaan BPBD menunjukkan bahwa koordinasi lintas aktor telah berjalan, namun masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan operasional. Kolaborasi ini

berlangsung dalam kerangka tata kelola daerah yang dinamis, di mana kapasitas kelembagaan, peran masyarakat, serta ketersediaan sarana prasarana turut menentukan efektivitas kebijakan penanggulangan bencana.

Karakteristik geografis Kabupaten Lahat yang memiliki aliran sungai dan wilayah perbukitan menyebabkan tingginya kerentanan terhadap banjir bandang. Kondisi tersebut tercermin dalam dokumen penanganan bencana serta catatan kegiatan BPBD yang secara rutin melakukan apel siaga, sosialisasi, dan pengecekan titik rawan. Namun, efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antar aktor serta kemampuan BPBD dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana kolaborasi berlangsung, penelitian ini menggunakan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari lima dimensi utama: dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Setiap dimensi dianalisis dengan mengintegrasikan temuan lapangan yang bersifat kualitatif, meliputi persepsi para pemangku kepentingan, dinamika komunikasi, kapasitas teknis, serta

dokumentasi kegiatan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi komprehensif terhadap mekanisme kolaboratif yang terbentuk, sekaligus memperlihatkan bagaimana faktor kontekstual terutama ketersediaan sarana prasarana, pola koordinasi, dan inisiatif masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan penanggulangan banjir. Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel dan ringkasan temuan digunakan untuk memperkuat struktur analisis serta memudahkan pembaca memahami pola hubungan antardimensi.

Dengan dasar tersebut, bagian berikut menyajikan analisis mendalam mengenai penerapan lima dimensi *collaborative governance* pada konteks penanggulangan banjir bandang di Kabupaten Lahat, dengan fokus pada bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, sejauh mana kepercayaan dan komitmen dibangun, serta bagaimana hasil kolaborasi tercapai pada tahap mitigasi maupun respons darurat.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan fondasi awal terbentuknya kolaborasi antara BPBD, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanggulangan banjir bandang di Kabupaten Lahat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi langsung melalui rapat forum

perangkat daerah, koordinasi tahunan, serta apel gabungan menjadi medium strategis yang memungkinkan para aktor bertukar informasi dan menyampaikan persoalan substantif terkait kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Interaksi langsung seperti ini memperlihatkan bagaimana proses deliberatif berlangsung dan bagaimana persepsi para pihak dibangun melalui ruang diskusi yang disediakan BPBD.

Berdasarkan data wawancara, forum perangkat daerah yang diselenggarakan BPBD berhasil menjadi arena konsultatif antara pemerintah, kecamatan, masyarakat, dan sektor swasta khususnya PT Bumi Merapi Energi. Melalui forum tersebut, BPBD mendorong penyampaian masukan dari masyarakat serta pemetaan permasalahan yang berulang, terutama terkait tingginya curah hujan, kerentanan titik-titik banjir, dan kebutuhan relawan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa dialog ini memiliki potensi besar dalam memperkuat respons kolektif, meskipun pelaksanaannya belum terjadwal secara sistematis dan masih bersifat insidental. Ketiadaan jadwal tetap menjadikan proses evaluasi kolaborasi tidak berlangsung secara konsisten, sehingga pengambilan keputusan terkait mitigasi dan

kesiapsiagaan berjalan tanpa pedoman pertemuan berkala.

Salah satu aspek penting dalam dialog tatap muka adalah bagaimana ruang tersebut memungkinkan lahirnya saling pengertian dan rasa hormat antar pihak. Baik BPBD maupun kelompok masyarakat menunjukkan sikap aktif dalam menghadiri apel siaga dan kegiatan sosialisasi, yang memperlihatkan adanya pengakuan terhadap pentingnya peran masing-masing aktor. Temuan wawancara dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menegaskan hal ini, di mana keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya BPBD dalam membangun kesiapsiagaan kolektif.

Namun demikian, hasil observasi juga mengidentifikasi sejumlah kekurangan teknis, seperti belum adanya sistem dokumentasi dan pelaporan rapat yang terstruktur. Minimnya dokumentasi membuat hasil diskusi sulit ditelusuri kembali, terutama ketika diperlukan perbaikan program atau penyusunan kebijakan baru. Selain itu, beberapa kegiatan dialog belum menyertakan mekanisme penyampaian informasi teknis secara memadai, misalnya terkait standar waktu penyelamatan (*rescue time*), potensi risiko, atau protokol evakuasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan

ketidakselarasan persepsi antara petugas dan masyarakat ketika menghadapi banjir.

Untuk memperjelas gambaran temuan tersebut, ringkasan analisis

dimensi dialog tatap muka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Dimensi Dialog Tatap Muka

Aspek Analisis	Temuan	Implikasi terhadap Kolaborasi
Frekuensi dan bentuk dialog	Forum perangkat daerah, apel gabungan, dan sosialisasi berlangsung, namun belum terjadwal secara rutin	Koordinasi berjalan tetapi belum stabil; proses evaluasi sulit konsisten
Kualitas pertukaran informasi	Diskusi membuka ruang bagi masukan dan pemetaan masalah, namun dokumentasi rapat kurang rapi	Potensi kehilangan data penting; sulit menindaklanjuti rekomendasi diskusi
Keterlibatan pemangku kepentingan	Pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta hadir aktif dalam forum	Ada penguatan peran lintas aktor, meningkatkan legitimasi keputusan
Saling menghargai dalam dialog	Masyarakat dan swasta hadir dalam kegiatan gabungan dan menanggapi undangan BPBD dengan positif	Meningkatkan rasa kebersamaan dan membangun fondasi kepercayaan

2. Membangun Kepercayaan dalam Proses Kolaborasi

Kepercayaan (trust) merupakan prasyarat fundamental dalam merajut kolaborasi antara BPBD, masyarakat, dan sektor swasta di Kabupaten Lahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tumbuh melalui tiga mekanisme utama: komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, dan keandalan kapasitas kelembagaan BPBD termasuk kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Melalui sosialisasi rutin,

apel gabungan kesiapsiagaan, dan kegiatan mitigasi bersama, relasi interaktif antara BPBD dan masyarakat terbentuk secara alami dan memperkuat persepsi bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab kolektif. Partisipasi aktif relawan dalam kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga memperlihatkan bahwa masyarakat menempatkan BPBD sebagai institusi yang kredibel dalam memberikan arahan dan informasi kebencanaan.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menunjukkan bahwa BPBD secara konsisten mengedepankan transparansi, terutama dalam menjelaskan berbagai keterbatasan operasional, seperti kurangnya peralatan evakuasi, ketidaksempurnaan sebagian fasilitas, dan hambatan logistik di titik banjir. Keterbukaan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, sebagaimana tercermin dari kesediaan relawan untuk membantu, termasuk mengambil peran awal dalam evakuasi ketika petugas menghadapi kendala waktu tempuh (rescue time). Hasil observasi peneliti menguatkan bahwa komunikasi langsung yang jujur dan realistik memainkan peran penting dalam membangun rasa saling percaya, terutama ketika masyarakat memahami bahwa keterlambatan respons bukan

disebabkan kelalaian, melainkan keterbatasan teknis.

Namun, aspek kepercayaan ini tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Dokumentasi BPBD menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas vital seperti perahu karet, helm keselamatan, tenda posko, dan mesin perahu berada dalam kondisi tidak optimal. Keterbatasan sarana prasarana tersebut berdampak pada kemampuan respons cepat yang secara langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap reliabilitas BPBD. Dalam konteks collaborative governance, kapasitas teknis lembaga pemerintah merupakan komponen penting dalam menjaga kepercayaan publik; ketika peralatan kunci dalam penanganan banjir tidak berfungsi optimal, rasa percaya yang sudah terbangun dapat tergerus. Berikut Daftar Fasilitas dan sarana prasarana BPBD Kabupaten Lahat:

Tabel 2. Fasilitas dan sarana prasarana BPBD Kabupaten Lahat

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	SUMBER
1.	Backhoe Loader	1	Baik	
2.	Mobil Truk Serbaguna	1	Rusak	Hibah
3.	Mobil Truk Tanki Air	1	Baik	Hibah
4.	Mobil Rescue Triton	1	Rusak	Hibah
5.	Mobil Pick Up L300	1	Baik	Hibah
6.	Motor Trail	4	Baik	Hibah
7.	Kapal Cepat	1	Baik	Hibah
8.	Perahu Piber	2	Baik	Prov
9.	Perahu Karet Rafting	4	3 Baik 1 Rusak	
10.	Perahu Karet LCR	2	1 Baik 1 Rusak	Prov
11.	Tenda Pengungsi 6 M X 12 M X 3,5 M	3	2 Baik 1 Rusak	Prov

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	SUMBER
12.	Tenda Posko	2	Rusak	Prov
13.	Tenda Doume	7	Rusak	APBD
14.	Tenda Keluarga Doume	5	Baik	Prov
15.	Tenda Keluarga 4,5 M X 4,5 M	4	Rusak	Prov
16.	Valbeat	10	Baik	Prov
17.	Baju Karhutla	4	2 Baik 2 Rusak	Prov
18.	Rompi Pelampung	20	15 Baik 5 Rusak	APBD
19.	Dayung Perahu	20	8 Baik 12 Rusak	APBD
20.	Mesin Perahu LCR 18 PK	2	Rusak	Prov
21.	Mesin Gergaji Chainsaw	5	2 Baik 3 Rusak	APBD
22.	Nozel Tembak	2	Baik	Prov
23.	Helm Rafting	20	10 Baik 10 Rusak	APBD
24.	Mesin Genset	2	1 Baik 1 Rusak	Prov
25.	Pompa Air Portable Bensin Kohler	1	Baik	Prov
26.	Pompa Air Honda WL20XN	2	1 Baik 1 Rusak	Prov
27.	Pompa Air Honda WB20XH	1	-	Prov
28.	Pompa Air Honda WL20XH	1	-	Prov
29.	Pompa Air Honda GX H50 (jinjing)	1	Baik	Prov
30.	Selang 60 Save 10 BAR 1,5 X 30 M	2	Baik	Prov
31.	Kompor Bio Massa	8	Baik	Prov
32.	Lampu Multi Player	8	4 Baik 4 Rusak	Prov
33.	Sliping Bed	11	1 Baik 10 Rusak	APBD

Temuan observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian kesalahpahaman masyarakat, terutama terkait waktu kedatangan petugas ke lokasi banjir, dipengaruhi oleh kurangnya penjelasan teknis mengenai kondisi fasilitas operasional. Minimnya sosialisasi mengenai keterbatasan peralatan dan proses mekanisme mobilisasi seringkali memunculkan interpretasi yang keliru, seperti anggapan bahwa keterlambatan penanganan disebabkan kurangnya kesigapan petugas. Oleh karena itu, kepercayaan yang sudah terbentuk melalui

dialog dan sosialisasi perlu diperkuat melalui pengelolaan data yang rapi, dokumentasi aset yang akurat, serta penyampaian informasi berbasis fakta operasional, termasuk kondisi fasilitas yang tersedia.

Kondisi sarana prasarana BPBD yang bervariasi kualitasnya menjadi salah satu faktor yang memediasi hubungan kepercayaan antara BPBD dan masyarakat. Masyarakat memberikan apresiasi ketika BPBD menyediakan tenda, kapal karet, atau peralatan evakuasi; namun pada saat yang sama,

mereka juga bergantung pada kesiapan alat tersebut dalam situasi krisis. Hubungan saling percaya dapat tumbuh lebih kuat apabila kapasitas kelembagaan terkelola dengan baik, tercermin melalui

kesiapan fasilitas dan kejelasan informasi teknis. Sebaliknya, fasilitas yang tidak siap dapat menimbulkan kesenjangan ekspektasi yang mempengaruhi kualitas kolaborasi.

Tabel 3. Dimensi Membangun Kepercayaan

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi terhadap Kepercayaan
Intensitas komunikasi	Sosialisasi, apel gabungan, dan kegiatan mitigasi dilakukan secara rutin	Meningkatkan kedekatan BPBD-masyarakat serta memperkuat persepsi kredibilitas
Transparansi informasi	BPBD terbuka mengenai kendala sarana prasarana, waktu respons, dan hambatan operasional	Membangun kepercayaan berbasis kejujuran; mengurangi potensi kesalahpahaman
Kondisi fasilitas	Beberapa aset seperti perahu karet, helm, mesin LCR, tenda posko dalam kondisi rusak atau terbatas	Mengurangi kapasitas respons cepat; berpotensi melemahkan kepercayaan
Persepsi masyarakat	Relawan aktif membantu evakuasi awal dan memahami sebagian kendala BPBD	Menumbuhkan relasi saling mendukung dan persepsi kesetaraan peran
Kelemahan yang teridentifikasi	Pengelolaan arsip dan dokumentasi masih lemah; belum ada sistem penyampaian informasi teknis mengenai rescue time	Menimbulkan misinformasi, memperlambat pembentukan kepercayaan yang mapan

Dengan demikian, pembangunan kepercayaan dalam kolaborasi penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat tidak hanya didorong oleh interaksi sosial yang intensif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas teknis BPBD dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kepercayaan akan bertumbuh apabila transparansi lembaga diimbangi dengan kesiapan fasilitas serta penguatan mekanisme komunikasi berbasis data yang akurat.

3. Komitmen terhadap Proses Kolaborasi

Komitmen terhadap proses merupakan elemen penting dalam kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash karena menentukan keberlanjutan kerja sama antara BPBD, masyarakat, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen para aktor di Kabupaten Lahat terbentuk melalui pengakuan bersama terhadap urgensi penanggulangan banjir, keterlibatan dalam kegiatan lapangan, serta kesediaan untuk berbagi peran sesuai

kapasitas masing-masing. Komitmen ini terlihat dalam partisipasi masyarakat dan relawan pada kegiatan pengecekan lokasi rawan, sosialisasi kebencanaan, serta pelaksanaan apel kesiapsiagaan yang dilakukan secara rutin. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bertindak sebagai subjek yang memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir.

Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menunjukkan bahwa pengakuan bersama atas pentingnya peran masing-masing aktor menjadi dasar munculnya komitmen yang relatif stabil. Masyarakat mengakui kapasitas teknis BPBD dalam menangani bencana, sedangkan BPBD mengakui kecepatan dan daya tanggap relawan yang sering kali menjadi pihak pertama yang berada di lokasi banjir. Relasi timbal balik ini menciptakan dasar komitmen yang dapat menopang terbentuknya kolaborasi yang lebih efektif. Data observasi mendukung temuan ini, karena kegiatan seperti sosialisasi dan pemantauan titik banjir dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antara petugas BPBD dan relawan masyarakat.

Meskipun komitmen tampak tumbuh melalui praktik lapangan, penelitian menemukan bahwa komitmen

tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Kolaborasi yang berjalan masih bersifat situasional karena belum adanya mekanisme formal seperti perjanjian kerja sama, agenda monitoring dan evaluasi bersama, atau standar prosedur operasional yang disusun lintas aktor. Ketiadaan perangkat kelembagaan yang mengatur kesinambungan kolaborasi menyebabkan hubungan kerja sama sangat bergantung pada situasi darurat dan inisiatif personal. Hal ini diperkuat dengan dokumentasi internal BPBD yang menunjukkan belum adanya regulasi rinci mengenai pembagian peran antara BPBD, relawan masyarakat, dan sektor swasta dalam proses penanganan banjir.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa tingkat komitmen aktor dipengaruhi oleh kemampuan mereka menyediakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Masyarakat sangat bergantung pada fasilitas BPBD seperti perahu karet, tenda, dan peralatan evakuasi, sedangkan BPBD sangat bergantung pada relawan masyarakat untuk mengatasi faktor geografis yang sulit dijangkau. Ketergantungan timbal balik ini menguatkan komitmen kerja sama, namun juga menunjukkan adanya kerentanan ketika salah satu pihak mengalami keterbatasan sumber daya. Kondisi

fasilitas yang tidak sepenuhnya optimal dapat melemahkan komitmen bersama karena menghambat kelancaran kegiatan lapangan yang menjadi inti kolaborasi.

4. Pemahaman Bersama dalam Proses Kolaborasi

Pemahaman bersama merupakan prasyarat penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif antara BPBD, masyarakat, serta sektor swasta dalam penanggulangan banjir Kabupaten Lahat. Pemahaman ini terbentuk melalui proses interaksi yang berulang, dialog terbuka, dan pengalaman bersama dalam menghadapi situasi darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para aktor memiliki konsensus mengenai urgensi penanggulangan banjir serta pentingnya berbagi peran sesuai kapasitas masing-masing. Konsensus ini menjadi dasar bagi keberlanjutan kolaborasi, terlebih dalam menghadapi ancaman banjir yang hampir terjadi setiap tahun dan memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Interaksi melalui apel kesiapsiagaan, rapat koordinasi, serta kegiatan sosialisasi yang melibatkan relawan dan warga menjadi mekanisme penting dalam menyatukan persepsi. Wawancara dengan kelompok relawan memperlihatkan bahwa mereka memahami tujuan kolaborasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta

memperbaiki respons awal terhadap banjir. Kesediaan relawan mengikuti sosialisasi dan simulasi yang diselenggarakan BPBD indicates bahwa proses pencocokan persepsi berjalan secara bertahap namun progresif. Data observasi juga menunjukkan bahwa diskusi teknis di lapangan membantu menyamakan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur evakuasi dan mitigasi.

Walaupun terdapat kesesuaian orientasi tujuan, penelitian menemukan bahwa pemahaman aktor belum sepenuhnya merata, terutama pada tingkat masyarakat akar rumput. Sebagian warga belum memahami alur koordinasi darurat, batasan operasional petugas, atau langkah teknis yang harus dilakukan ketika air mulai naik. Kesalahpahaman mengenai “rescue time”, misalnya, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan informasi yang dapat menurunkan efektivitas kolaborasi. Minimnya literasi kebencanaan menyebabkan warga sering kali menunggu instruksi tanpa mengetahui tindakan awal yang bisa dilakukan secara mandiri. Ini menunjukkan perlunya penguatan transfer pengetahuan melalui pelatihan reguler dan materi informasi yang lebih sistematis.

Selain faktor literasi, kapasitas teknis yang berbeda antara BPBD dan masyarakat turut mempengaruhi

kedalaman pemahaman bersama. BPBD memiliki pengetahuan profesional mengenai pemetaan risiko dan prosedur standar tanggap darurat, sementara masyarakat lebih memahami kondisi geografis lokal dan pola banjir. Kombinasi pengetahuan profesional dan lokal sebenarnya berpotensi memperkuat pemahaman kolektif, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena belum adanya media formal yang mengintegrasikan kedua jenis pengetahuan tersebut. Dokumentasi lapangan juga memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat tentang penggunaan peralatan evakuasi masih terbatas akibat tidak adanya pelatihan rutin atau simulasi lanjutan.

Tantangan pemahaman bersama juga berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang belum sepenuhnya fungsional. Ketika perahu karet atau mesin evakuasi tidak berfungsi optimal, masyarakat mungkin memiliki ekspektasi yang tidak sesuai mengenai kemampuan respons BPBD. Kesenjangan antara ekspektasi dan kapasitas ini dapat memicu mispersepsi yang menghambat pemahaman kolektif. Oleh karena itu, penguatan pemahaman bersama memerlukan penyelarasan antara informasi, kapasitas teknis, serta kondisi riil fasilitas di lapangan. Penyelarasan ini

hanya dapat dicapai melalui intensifikasi sosialisasi, dokumentasi yang rapi, serta penyebaran informasi risiko yang mudah diakses publik.

5. Hasil Sementara (Interim Outcomes)

Hasil sementara dari kolaborasi penanggulangan banjir antara BPBD Kabupaten Lahat, masyarakat, dan sektor swasta menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan capaian pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, meskipun belum sepenuhnya optimal pada fase tanggap darurat dan pemulihian. Hasil ini tampak dari pelaksanaan apel kesiapsiagaan, pembentukan relawan desa tangguh, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya evakuasi awal ketika banjir terjadi. Wawancara dengan BPBD dan relawan memperlihatkan bahwa koordinasi lapangan berjalan cukup efektif, terutama ketika terjadi kejadian banjir mendadak seperti di Kecamatan Kikim Timur. Masyarakat mampu mengambil langkah awal sebelum BPBD tiba di lokasi, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan berbasis komunitas.

Selain capaian tersebut, muncul pula bentuk umpan balik positif sebagai konsekuensi dari intensitas hubungan antaraktor. BPBD mengakui bahwa warga membantu mempercepat proses evakuasi, sementara masyarakat menyatakan bahwa

kehadiran BPBD dan relawan memberikan keamanan psikologis selama musim hujan. Umpam balik ini mencerminkan terbentuknya hubungan timbal balik yang konstruktif. Namun, hasil observasi memperlihatkan bahwa efektivitas aksi di lapangan masih sangat bergantung pada kondisi sarana dan prasarana BPBD. Ketika fasilitas seperti perahu karet, rompi keselamatan, atau tenda pengungsitan tidak berada dalam kondisi prima, kecepatan respons kolaboratif menjadi terhambat. Hal ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesiapan pemerintah.

Penelitian juga menemukan bahwa tanggung jawab bersama mulai terinternalisasi dalam tindakan para pihak. BPBD mengambil alih penanganan lanjutan setelah relawan melakukan evakuasi awal, sementara sektor swasta seperti PT BME berkontribusi melalui penyediaan alat berat atau dukungan logistik. Dengan demikian, aktor yang terlibat telah mengisi peran masing-masing sesuai kapasitas, menunjukkan perkembangan positif dalam komitmen operasional. Meski demikian, internalisasi tanggung jawab ini belum disertai mekanisme evaluasi bersama yang sistematis sehingga pembelajaran kolaboratif dari setiap kejadian belum terdokumentasi secara optimal.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan ketidaksiapan fasilitas membuat hasil kolaborasi pada tahap pemulihan masih terbatas. Data dokumentasi menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur dasar seperti jembatan kecil, drainase, dan akses jalan masih memerlukan waktu lama untuk diperbaiki pascabencana. Situasi ini mencerminkan bahwa kolaborasi yang telah berjalan masih lebih kuat di tahap kesiapsiagaan dibanding pemulihan. Dengan demikian, hasil sementara ini lebih menggambarkan bentuk adaptasi awal yang menunjukkan potensi perkembangan, tetapi belum mencapai bentuk kolaborasi yang stabil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil sementara menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kewaspadaan dan respons komunitas. Namun, efektivitas kolaborasi pada area strategis masih terkendala kapasitas kelembagaan, terutama terkait fasilitas, anggaran, koordinasi evaluasi, dan literasi kebencanaan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan BPBD dan desain kolaborasi yang lebih terstruktur agar capaian sementara dapat berkembang menjadi hasil jangka panjang yang lebih stabil dan transformatif.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara BPBD Kabupaten Lahat, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanggulangan banjir bandang menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun belum sepenuhnya terlembaga secara sistematis. Melalui analisis lima dimensi collaborative governance, terlihat bahwa interaksi antar-aktor telah membentuk pola kerja sama yang konstruktif, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Dialog tatap muka yang berlangsung dalam berbagai forum koordinasi menunjukkan adanya ruang deliberatif, meskipun belum dilaksanakan secara berkala sehingga mengurangi konsistensi proses perencanaan dan evaluasi. Pada saat yang sama, kepercayaan antara BPBD dan masyarakat terbentuk melalui aktivitas rutin seperti sosialisasi, apel gabungan, serta pelibatan relawan. Namun demikian, aspek kepercayaan ini masih menghadapi tantangan akibat terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, sistem dokumentasi yang belum baku, dan sosialisasi teknis yang belum merata kepada warga, terutama terkait waktu respons dan prosedur keselamatan.

Temuan penelitian secara jelas menunjukkan bahwa dimensi yang paling

lemah terletak pada komitmen terhadap proses. Kolaborasi telah berjalan, tetapi masih bersifat situasional karena belum didukung mekanisme kelembagaan yang kuat seperti standar prosedur operasi bersama, struktur monitoring, maupun kesepakatan formal dengan masyarakat dan pihak swasta. Kolaborasi lebih banyak ditopang oleh relasi personal dan respons spontan pada saat banjir terjadi, bukan oleh sistem yang terinstitusionalisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pemahaman bersama yang masih timpang, terutama antara BPBD dan masyarakat akar rumput. Meskipun terdapat konsensus mengenai urgensi penanggulangan banjir, kesenjangan kemampuan teknis masyarakat dalam memahami prosedur penanganan darurat masih tampak jelas. Sementara itu, hasil kolaboratif yang telah dicapai umumnya berada pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, seperti peningkatan partisipasi relawan dan penyelenggaraan simulasi bencana, tetapi hasil pada tahap tanggap darurat masih terbatas karena kendala anggaran, infrastruktur, serta ketidaksiapan peralatan yang tidak seluruhnya dalam kondisi baik.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kolaborasi ke depan perlu diarahkan pada pembenahan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan proses

kolaboratif. Komitmen antar-aktor perlu ditransformasikan dari hubungan informal menjadi struktur formal yang terukur melalui penyusunan prosedur kerja lintas aktor, pembentukan forum koordinasi berkala, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat memastikan keberlanjutan proses setelah tahap mitigasi. Selain itu, peningkatan kepercayaan dan pemahaman bersama dapat dicapai melalui perbaikan sistem komunikasi risiko, penyusunan modul kesiapsiagaan yang mudah dipahami masyarakat, serta penguatan sistem dokumentasi yang konsisten agar aliran informasi lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa fasilitas dan sarana prasarana BPBD berada dalam kondisi yang memadai karena kapasitas operasional yang kuat akan meningkatkan legitimasi lembaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, khususnya pada aspek komitmen proses dan kesiapan infrastruktur kelembagaan, kolaborasi penanggulangan banjir di Kabupaten Lahat berpotensi berkembang menjadi sistem tata kelola yang lebih adaptif dan tahan krasis. Upaya ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi penguatan governance berbasis kolaborasi dalam

konteks pemerintahan daerah, terutama ketika menghadapi risiko bencana yang semakin meningkat. Untuk penelitian selanjutnya, pemetaan mendalam mengenai faktor kepemimpinan lokal, inovasi teknologi kebencanaan, dan peran aktor non-pemerintah akan memberikan ruang pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kolaborasi dalam situasi darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriampa, A., Ibrahim, A., Hasniati, Abdullah, T., & Iskandar, D. (2024). Effectiveness of disaster management programs: A collaborative governance analysis of flood response in North Kalimantan Province. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4(3), 193–200. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v4i3.718>
- Anggara, B., Idris, A., & Hasanah, N. (2019). Penanganan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 879–890. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=8713>
- Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kecamatan Padang Selatan. *JDKP: Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 123–137. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum03>

- Anwar, K. (2024). Analysis of Community Participation based Approach to Disaster Mitigation Reduction. *Disaster Advances*, 17(2), 31–39.
<https://doi.org/10.25303/172da031039>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4 (ed.)). SAGE Publications.
- Haddow, G. D., Bullock, J. A., & Coppola, D. P. (2017). *Introduction to emergency management* (6 (ed.)). Butterworth-Heinemann.
- Hasanuddin, Junita, A., & Siregar, N. S. S. (2025). The role of the regional disaster management agency (BPBD) in preventing flood disasters in Mandailing Natal Regency. *Perspektif*, 14(1), 173–182.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i1.13681>
- Kamadhis UGM, B. (2007). *Bencana alam*. UGM Press.
- Kurniadi, A. (2024). Analysis of community participation-based approach to disaster mitigation reduction. *Disaster Advances*, 17(2), 31–36.
<https://doi.org/10.25303/172da031039>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3 (ed.)). SAGE Publications.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana. (2023).
- Setiawan, B. A. P., Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative governance dalam penanganan banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 54–64.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>